

**Judul** : Tiga tahun tak impor beras, negara tangguh hadapi ancaman krisis pangan  
**Tanggal** : Senin, 22 Agustus 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Tiga Tahun Tak Impor Beras

## Negara Tangguh Hadapi Ancaman Krisis Pangan

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini bangga atas capaian swasembada pangan dengan tidak ekspor beras selama tiga tahun berturut-turut. Hasil ini mendapat penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI). Dengan pencapaian ini, Indonesia bisa semakin tangguh dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.

"Ini merupakan prestasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan). Yang harus ditekankan ke depan adalah ancaman krisis pangan global ini. Kita berharap capaian ini menjawab tantangan krisis pangan global," kata Anggia kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Anggia berharap, program kerja pemerintah dari pusat hingga ke daerah dapat terus mendukung peningkatan produktivitas pertanian Indonesia. Sehingga, Indonesia mampu menghadapi krisis pangan global, sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan.

"Kita punya banyak komoditi pangan, ada sorgum, jagung, dan segala umbi-umbian. Ke depannya, harus mulai digerakkan program-programnya sehingga swasembada ini tidak berhenti hanya di beras saja," tambah dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyimpulkan Indonesia dapat mencapai swasembada beras tahun 2019-2021 merupakan prestasi yang dapat menjadi teladan bagi negara lain di saat krisis. Tantangan ke depan memang semakin berat. Pemerintah tentu tidak hanya berupaya mempertahankan sur-

plus, tapi juga bagaimana keluar dari pandemi Covid-19, iklim ekstrim, dan geopolitik serta ancaman krisis pangan global.

"Kita harus menjaga swasembada berkelanjutan ke depan dengan melakukan berbagai upaya. Seperti dengan adanya benih unggul berkualitas, pemupukan yang baik, dan upaya hilirisasinya. Kemudian kita tingkatkan lagi sehingga surplusnya bisa digunakan untuk ekspor," kata Suwandi.

Selain mempertahankan swasembada secara berkelanjutan, lanjut Suwandi, tantangan berikutnya adalah mewujudkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan. Langkah ini menjadi peluang mendorong pengembangan sorgum, singkong, jagung, dan pangan lainnya untuk ditingkatkan produksinya.

"Demikian juga untuk kedelai, berpeluang besar karena untuk petani saat ini kedelai harganya sangat bagus. Kita bangkitkan lagi itu supaya tumbuh, menjalankan upaya ini secara komprehensif sehingga tidak hanya beras, komoditi lain tetap didorong dengan kualitas yang naik kelas," jelasnya.

Ketua Umum DPP Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) Walneg S Jas menilai, penghargaan IRRI ini adalah bentuk apresiasi lembaga internasional atas kerja keras bangsa Indonesia dalam mempertahankan surplus pangan selama 3 tahun terakhir.

"Pencapaian ini spesial karena dengan adanya krisis pandemi dan dinamika lain yang kurang menguntungkan," ucapnya.

Menurut Walneg, Kementan

telah melakukan berbagai macam upaya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan surplus dan ketahanan pangan komoditi lainnya. Upaya itu tentu dikolaborasikan dalam berbagai unsur, baik dalam konteks intensifikasi, ekstensifikasi dan konteks perbaikan perkembangan teknologi.

"Termasuk juga program yang terus-menerus dari Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi," terangnya.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menuturkan, Indonesia surplus beras pada periode 2019 hingga 2022 dengan surplus rata-rata per tahunnya mencapai 2,4 juta ton. Hal ini dapat terwujud akibat peningkatan produktivitas padi dari 5,11 ton per hektare menjadi 5,23 ton per hektare.

Pamrihadi menyarankan, Good Agriculture Practice ini terus diterapkan melalui penyediaan benih unggul, metode budi daya yang efektif dan efisien, dan peningkatan coverage area sistem irigasi. Lalu, pendampingan dari penyuluh, praktisi atau swasta serta penanganan pasca panen dengan penggunaan mekanisasi pertanian, vertical dryer dan gudang penyimpanan terstandar.

"Yang tidak kalah penting juga dilakukan adalah adanya keterlibatan lembaga keuangan dalam penyediaan modal dan lembaga asuransi untuk penjaminan risiko kegagalan. Serta kolaborasi dalam peningkatan kerja sama penyerapan dengan off taker, stakeholder dan BUMD maupun BUMN," tambahnya. ■ KAL